

PEREKONOMIAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN ABAD 15 -18 M

Apriana¹⁾ Heryati²⁾

^{1) 2)} Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palembang
¹⁾nisrina.dani@gmail.com ²⁾heryatitoya15@gmail.com

Abstrak

Palembang memiliki sungai Musi yang merupakan muara sungai Batanghari Sembilan berperan sebagai distributor, baik barang-barang yang datang dari luar ataupun barang-barang yang berasal dari daerah uluan. Orang-orang Uluan mempunyai peranan penting karena mereka sangat menentukan maju mundurnya suatu pusat perdagangan di Palembang yang berfungsi sebagai Bandar transito, yang terletak pada urat nadi perdagangan pelayaran dunia via selat Malaka. Penelitian ini menggunakan Metode historis, Jenis Penelitian Kajian Pustaka. Dari hasil penelitian mendapatkan Kesimpulan Palembang merupan ibukota Sumatera Selatan, dahulunya merupakan pusat perdagangan internasional pasca runtuhnya kerajaan Malaka oleh Portugis. Pada masa kesultanan, sultan mempunyai peran penting dalam perdagangan. Sultanlah yang turut menentukan harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang asing. Pedagang asing itu diantaranya berasal dari Arab, India, Cina dan lain-lain. Orang-orang Cina tidak diizinkan tinggal di darat, mereka harus tinggal di air/laut. Pedagang-pedagang muslim selain berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam dikalangan masyarakat. Tidak sedikit diantara orang-orang asing itu mempunyai peranan penting di dalam istana raja dan tidak kurang pula diantara mereka yang menjabat jabatan penting dalam kerajaan, seperti jabatan syahbandar yang pada umumnya terdiri dari orang-orang asing. Sejak itu, Kesultanan Palembang telah berakhir pada tahun 1823 dan berakhirnya Kesultanan Palembang secara politis, maka secara tidak langsung perekonomian Palembang dimonopoli oleh Belanda.

Kata kunci: peranan, sungai batanghari sembilan, perekonomian

Abstract

Palembang has the Musi river, which is the mouth of the Batanghari Sembilan river, which acts as a distributor, both for goods that come from outside or those that come from the uluan area. The Uluan people have an important role because they determine the back and forth of a trading center in Palembang which functions as a transit port, which is located in the heart of world shipping trade via the Malacca Strait. This research uses historical method, literature review research type. From the research results, it can be concluded that Palembang is the capital of South Sumatra, formerly the center of international trade after the collapse of the Malacca kingdom by the Portuguese. During the sultanate period, the sultan had an important role in trade. The sultan was the one who set prices and signed contracts with foreign traders. Among these foreign traders came from Arabia, India, China and others. Chinese people are not allowed to live on land, they have to live in water / sea. Besides trading, Muslim traders also spread Islam among the community. Not a few of these foreigners had an important role in the king's palace and no less among those who held important positions in the kingdom, such as the position of shahbandar which generally consisted of foreigners. Since then, the Palembang Sultanate ended in 1823 and politically the Palembang Sultanate ended, so the economy of Palembang was indirectly monopolized by the Dutch.

Keywords: role, batanghari sembilan river, economy

Pendahuluan

Perdagangan Indonesia sudah terkenal sejak dari sejarah kuno, yaitu dari Sumatera Tengah dalam

abad kelima dan keenam dan dari kerajaan Melayu Hindu Sriwijaya yang berkembang disekitar Palembang dari abad ke-7 hingga

abad ke-14. Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai, negara perniagaan dan negara maritim yang berkuasa di laut. Kekuasaan dan kekayaannya disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa sejak lima belas abad lamanya mempunyai arti yang penting dalam sejarah. (Kenneth R. Hall, 1976: 63)

Kapal-kapal yang melalui Selat Malaka singgah di pelabuhan-pelabuhan untuk men gambil air minum serta barang-barang perbekalan lainnya. Beberapa pelabuhan di pantai selatan ini penting artinya sebagai pelabuhan perbekalan, dan oleh karena itu Sriwijaya berusaha untuk memperoleh monopoli serta menguasai daerah pesisir dikedua belah pantai selat Malaka. Sriwijaya berhasil menduduki daerah Lampung, Jambi, semenanjung Malaka dan tanah genting Kra bahkan pulau Srilanka. Pelayaran Sriwijaya meliputi lautan sampai Vietnam Utara ke timur dan India ke barat bahkan tampaknya sampai ke Malagasi (Kenneth R. Hall, 1976: 63). Pasca keruntuhan Sriwijaya, kesultanan Melayu Malaka kemudian menggantikan kedudukan Sriwijaya sebagai kuasa politik Melayu utama di kawasan ini.

Ketika Malaka ditaklukkan Portugis pada 1511 (Slamet Muljana, 2005:211) monopoli lada berpindah ke Aceh dan Banten. Diantaranya terletak daerah yang tidak berada dibawah kekuasaan kedua kesultanan tersebut, yaitu Palembang, Jambi dan Siak. Palembang sebagai bekas pelabuhan internasional menjadi penting kembali tidak hanya bagi pedagang-pedagang muslim dari Malaka yang tidak tunduk kepada

Portugis, tetapi juga bagi pedagang-pedagang Jawa dan Cina. Palembang memiliki sungai Musi yang merupakan muara sungai Batanghari Sembilan berperan sebagai distributor, baik barang-barang yang datang dari luar ataupun barang-barang yang berasal dari daerah uluan. Orang-orang Uluhan mempunyai peranan penting karena mereka sangat menentukan maju mundurnya suatu pusat perdagangan di Palembang yang berfungsi sebagai Bandar transito, yang terletak pada urat nadi perdagangan pelayaran dunia via selat Malaka. Suatu bandar yang penuh dengan kesibukan untuk mengadu untung dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini nampak betul peran pemilik modal dalam kegiatan itu, khusus golongan raja atau aristokrat pada umumnya. Betapa pentingnya peranan sultan Palembang dalam perdagangan. Sultanlah yang mengatur harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang asing. Hingga pada akhirnya datanglah Belanda dan berhasil menguasai Palembang.

Untuk lebih jelas dalam makalah ini selanjutnya akan diulas lebih mendalam khususnya mengenai kondisi perekonomian masyarakat Sumatra Selatan abad 15-18M.

Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini, penulis gunakan adalah metode Sejarah (Metode Historis). Menurut Gottschalk dalam Herlina (2008 : 2) mengatakan yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah dalam pengertiannya secara umum adalah penyelidikan

atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perpektif historik (Abdurrahman, 2011 : 103). Metode sejarah dapat diartikan juga sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2002 : 27). Dalam penelitian ini konsep yang di gunakan penulis adalah menggunakan Konsep Deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata (2003: 75) , Konsep tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Adapun langkah-langkah penelitian sejarah antara lain, pertama Heuristik. Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah biasanya dilakukan diperpustakaan, tinjauan kepustakaan hanya dapat dilakukan apabila topik yang akan dipelajari telah dipilih dan dirumuskan (Sair, 2012:10). Kedua, Kritik sumber (Penilaian data) adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenaran, dengan demikian melalui sumber diharapkan agar setiap data-data sejarah diberikan hendak di uji terlebih dahulu validitas dan rehabilitasinya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya bukan hasil dari suatu fantasi dan manipulasi sejarah (Daliman, 2012:66). Ketiga, Interpretasi (analisa data) yaitu menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Keempat , historiografi atau penulisan sejarah ialah cara merekonstruksi suatu gambaran masa

lamapau berdasarkan data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 194:89).

Hal yang sangat penting dalam suatu penulisan sejarah adalah masalah pendekatan (*approach*). Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk meninjau serta mengupas suatu permasalahan, dapat ditentukan cara dalam menganalisis permasalahan, dan menjadi titik awal dalam meninjau permasalahan. (Yass, 2004 : 47).

Penggunaan pendekatan bertujuan dengan pokok pembahasan pendekatan yang penulis gunakan. Dalam penelitian yang berjudul "Perkembangan PT Pos Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru Tahun 1966-1998", penulis menggunakan pendekatan multidimensional yang menggunakan berbagai ilmu sosial seperti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pendekatan sosial di dalam tulisan ini akan menyoroti masalah hubungan PT. Pos cabang Palembang untuk meningkatkan pelayanannya dengan masyarakat dalam perkembangan PT. Pos cabang Palembang . Dalam ilmu sosial dipinjam konsep perkembangan yaitu suatu proses perubahan yang berjalan secara terus-menerus, terdorong oleh kekuatan dari dalam maupun dari luar menuju ke arah yang lebih baik.

Hasil dan Pembahasan Perdagangan dan Pelayaran Masyarakat Sumatera Selatan

Palembang terletak di kedua tepi sungai Musi, tempat muara Sungai Ogan di Kertapati dan Komering di dekat pulau kembara Plaju. Palembang tentunya dahulu dibangun atas pertimbangan-pertimbangan yang seksama, yaitu lalu lintas anak sungai Batanghari

dikuasainya dikarenakan melalui sungai-sungai itulah hasil bumi daerah Uluu dibawa ke pusat kerajaan. Palembang selain pusat kerajaan, juga sebagai kota pelabuhan berfungsi sebagai bandar transito. Oleh karena itu Palembang sejak semula tumbuh dan berkembang sebagai pusat kekuasaan maritim, baik pada masa pra Islam maupun pada masa perkembangan Islam. Palembang terletak dekat dengan selat Malaka, yang merupakan urat nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional dari abad ke abad, bahkan selat Malaka pernah memegang peranan penting selama beberapa abad sebagai pusat perdagangan yang mengontrol lalu lintas pelayaran dan perdagangan di perairan Asian Tenggara. (Prajudi Atmosudirdja, tth: 41-42)

Seperti halnya masyarakat Palembang sebagai pusat kota kerajaan maritim, yaitu kerajaan Sriwijaya yang menitikberatkan kehidupannya pada pelayaran dan perdagangan. Sriwijaya merupakan pusat perdagangan dan pelayaran Internasional. Berbagai komoditas ekspor yang dihasilkan Nusantara dikirim ke berbagai Asia dan Eropa melalui Bandar niaga di Sriwijaya. Komoditas yang dibawa dari Asia dan Eropa ke wilayah Nusantara Bandar niaga ini pula. Kemudian komoditas tersebut disebarluaskan oleh pedagang-pedagang Melayu keseluruh kawasan Nusantara. Menurut Wolters dalam Abdullah Idi, sejarah perekonomian Sriwijaya sangat ditentukan oleh perdagangan dan pertanian. Banyak pedagang dari pulau-pulau lain di Nusantara dan luar negeri tiba di Pelabuhan-pelabuhan Sumatera Selatan, seperti Tungal, Sabak, Palembang, Jambi, Bengkulu dan berbagai pelabuhan di

Lampung Selatan. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya telah melakukan kontak perdagangan dengan berbagai bangsa asing, misalnya Cina, Timur Tengah, Persia, India, dan Bangsa Barat. Leur mengklasifikasikan komoditas ekspor Sriwijaya yang dikirim keberbagai Negara asing, misalnya ke Arab, meliputi: kayu gaharu, kapur barus, cendana, gading gajah, timah, kayu eboni, kayu papan, rempah-rempah dan kemenyan. Sedangkan ke Cina, Sriwijaya mengeksport gading gajah, air tawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin Kristal, culak badak, wangi-wangian, bumbu masakan dan obat-obatan. (Abdullah Idi, 2011: 66)

Begitu pula suasana di kota Palembang seperti yang dilukiskan oleh Van Sevenhoven, tidak jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Perahu-perahu datang hilir mudik membawa barang dagangannya untuk dijual, perahu-perahu Cina hilir mudik membawa bahan-bahan pakaian (tekstil) serta pemiliknya dengan muka yang berseri-seri menghitung hitung keuntungannya. Tetapi tidak kurang pula terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian dengan terbaliknya perahu-perahu mereka, sehingga habislah barang dagangan dan keuntungan yang diperolehnya. (Van Sevenhoven, 1971: 22)

Nampak dengan jelas, bahwa Palembang merupakan kota yang sibuk, suatu kota Melayu Kuno yang khas, yang sebagian besar terdiri dari rumah-rumah rakit-rakit yang terapung di atas air. Seolah-olah selalu siap untuk pergi setiap saat apabila kelaliman dari tuan-tuan tanah terlalu berat menekan mereka. Tetapi juga selama beberapa abad merupakan Negara yang mengelilingi suatu kraton Jawa, yang telah

memberi corak sedemikian jauh (P.De Roo De La Faille, 1971:11) sehingga pengaruhnya sekarang juga masih terdapat di dalam bahasa dan lembaga-lembaga kehidupan masyarakat kota Palembang. Bila dilihat latar belakang historisnya, keraton Kesultanan Palembang sejak awal telah memperkenalkan dan menerapkan tradisi dan budaya Melayu-Jawa. Kesultanan Palembang memang sejak awal berorientasi ke Jawa, tetapi pada saat yang sama tidak dapat melepaskan dirinya dari dunia "Selat Malaka" yang Melayu (Taufik Abdullah,1986: 57).

Sungai Musi yang penuh dengan perahu-perahu tambang dan rakit-rakit yang hilir mudik menjajahkan barang-barang dagangannya, seperti: sayur-sayuran, buah-buahan, ikan basah dan kering, barang-barang kelontong, tekstil, barang pecah-belah dan lain-lain. Kadang-kadang rakit-rakit dan perahu-perahu merupakan pasar kecil yang terapung diatas air. Perdagangan itu tidak hanya dilakukan oleh penduduk kota saja, tetapi juga oleh orang-orang Uluan yang milir membawa hasil hutan dan tanamannya melalui anak-anak sungai Musi, ikut serta meramaikan pasar-pasar terapung itu. (Ma'moen Abdullah, 1991: 88)

Menurut laporan Pires, kecuali raja pembesar-pembesar dari kerajaan maritim itu pun turut mengadu untung dalam berbagai usaha perdagangan dan pelayaran, kadang-kadang raja itu tidak memiliki kapal sendiri tetapi memiliki saham dalam kapal dan perahu yang pulang pergi dari Malaka. Sistem partnership demikian juga berlaku dalam sebagian besar perdagangan di negeri kita ini pada zaman itu disebut "*Commenda*". Oleh

Karen itu dikerajaan maritim seperti Palembang, baik kekuasaan politik maupun ekonomi dipegang oleh raja atau kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau kadang-kadang sebagai peserta. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka, yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dari pajak yang besar.

Untuk memungut sumua penghasilan di dalam susunan birokrasi kerajaan, dibentuklah jabatan-jabatan mantra-pajak kelautan. Syahbandar biasanya dipegang oleh orang-orang yang beragama Islam (ketika masa perkembangan Islam di daerah ini). Secara umum syahbandar dapat diartikan sebagai penguasa pelabuhan, atau raja pelabuhan. Tugas utama Syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang yang dibawahinya, dalam hal ini termasuk pengawasan di pasar dan gudang. Ia mengawasi timbangan, ukuran barang dagang, dan mata uang. Dalam perdagangan dan pelayaran, Syahbandar merupakan penengah. Olehkarena itu syahbandar biasanya diangkat dari kalangan saudagar asing. Syahbandar memberi petunjuk mengenai cara-cara berdagang setempat, ia pula menaksir barang dan menentukan pajak yang harus dipenuhi serta bentuk yang harus diserahkan sebagai upeti kepada raja. Nahkoda, penumpang, dan awak kapal tidak diperkenankan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan syahbandar. Olehkarena itu syahbandar memegang peranan yang penting dalam perdagangan di Nusantara. (Marwati Djoened, 1984: 46)

Betapa pentingnya peranan sultan Palembang dalam perdagangan. Bagindalah yang mengatur harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang asing, yang dapat dihubungkan dengan sepucuk surat yang dikirimkan oleh Gubernur Jendral Belanda di Batavia kepada sultan. Hubungan Kesultanan Palembang dan Belanda dimulai sejak 1616. Hubungan ini terjadi ketika VOC di Jambi, di mana Andries Soury mengirim hadiah kepada Raja Palembang (Pangeran Madi Ing Angkoso 1594-1627) melalui utusan Palembang yang bertugas ke Jambi. Pada kesempatan itu disampaikan harapan terjalinnya suatu hubungan dagang antara Palembang dan VOC.

Pada 1637, Kapten Soury mengunjungi raja Palembang, suatu ketika, Kapten Soury diminta Kapten Arab Anthonio van Diemen untuk menyerahkan hadiah kepada Pangeran Palembang berupa dua buah kanon (*geschut*) dan 20 pucuk bedil (*mussquest*) dengan imbalan Pangeran Palembang menyetujui untuk memberikan suatu tempat pembuatan gudang yang diinginkan Belanda. Gudang itu dapat diperlengkapi dengan delapan kanon berbentuk permanen untuk melindungi Palembang dari musuh-musuhnya. Kesediaan Belanda itu harus diimbangi dengan pemberian hak monopoli lada. Kontrak ini dikenal dengan sebutan Kontrak 21 Juli 1641.

Perjanjian berkenaan dengan timah dan lada mengalami beberapa kali perubahan atau revisi. *Pertama*, revisi dilakukan pada 20 Oktober 1642 guna memperkuat hak monopoli lada. *Kedua*, pada 1662 dilakukan revisi kembali atas kontak tahun 1642 yang mana Belanda

diizinkan kembali membangun loji dan gudang ditempat yang cukup baik dan dekat sungai. Loji ini dikenal dengan Loji Sungai Aur yang berhadapan dengan istana Beringin Jangut. *Ketiga*, kontak baru dilakukan pada 3 Juli 1678, yaitu tentang wewenang VOC untuk menurunkan harga Lada. *Keempat*, kontak yang ditandatangani pada 26 April 1681 atas imbalan kemenangan ekspedisi Belanda atas Sultan Jambi. *Kelima*, kontak tentang monopoli timah dan lada yang dilakukan pada 2 Juli 1722. *Keenam*, kontrak baru tentang monopoli lada dan timah Bangka dan Belitung yang ditandatangani pada 10 September 1755. *Ketujuh*, kontrak tentang monopoli timah dan lada yang dilakukan pada 15 Juli 1763 pada Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (1758-1776). Isinya adalah antara lain monopoli lada dan timah tetap ditangan VOC. *Kedelapan*, kontrak secara terpaksa yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin (1776-1803) dan VOC yang diwakili oleh A.H.C. Staringh di atas armada Thetis pada 31 Agustus 1791. Kontrak ini masih berisi tentang timah dan lada. (Husni Rahim, 1998: 70-79).

Selama kontrak-kontrak dilakukan dalam kurun waktu 1641-1784, hampir setiap adanya kontrak antara VOC-Belanda dan Sultan Palembang, posisi Sultan Palembang selalu pada pihak yang "kalah". Pihak Sultan senantiasa tidak berdaya berhadapan dengan VOC. Intervensi VOC dalam berbagai konflik internal (misalnya ketikan suksesi kepemimpinan) dan konflik dengan pihak eksternal (misalnya meminta bantuan untuk melawan Sultan Jambi), merupakan alasan-alasan yang turut menyebabkan lemahnya pihak Sultan Palembang dalam setiap

kontrak yang dilakukannya dengan VOC.

Pada tanggal 18 Agustus 1823 dinyatakan bahwa Kesultanan Palembang dihapuskan dan kemudian pemerintah atas negeri Palembang dan rakyat Palembang diserahkan kepada Belanda. Sejak itu, Kesultanan Palembang telah berakhir. Meskipun Kesultanan telah dihapuskan, tetapi Belanda masih mengizinkan Sultan untuk memakai gelar kesultanan sebagai simbol. Berakhirnya Kesultanan Palembang secara politis, semakin memperkokoh kedudukan Belanda di Palembang dan Bangka-Belitung serta pulau-pulau lainnya. (Husni Rahim, 1998: 81-82).

Selanjutnya golongan priyayi dari tingkat tinggi (pangeran) selain berdagang, yang biasa dianugrahi dusun/marga oleh raja sebagai pinjaman, memenuhi sebagian kebutuhan mereka dari hasil dusun/marg tersebut. Sedangkan priyayi-priyayi lainnya yang tidak dapat dusun/marga, selain berdagang memelihara budak, juga hidup dari kerajinan tangan dan kerajinan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh para miji dan wanita-wanita isteri dari priyayi-priyayi. Diantaranya wanita-wanita tersebut menenun songket, kain tanjung Palembang dan menyulam dengan benang mas.

Lapisan masyarakat kebanyakan atau non-elite dari kerajaan maritim ini, selain berdagang juga menangkap ikan, bertukang (tukang rumah, tukang emas, perak, besi untuk alat-alat rumah tangga dan pertanian, tukang perahu), membuat jala, menganyam dan lain-lain, dan bagi kaum wanita: menenun songket, membatik, menyulam dan membuat kue untuk

dijajakan. Mereka biasanya hidup berkelompok-kelompok sesuai dengan keterampilannya dan tempat mereka tinggal sesuai dengan keahliannya seperti: kampung kepandean, kampung Kamasan, kampung Kuningan dan sebagainya. (Ma'moen Abdullah, 1991: 89)

Selain golongan-golongan tersebut, masih ada golongan orang-orang asing: yaitu orang Cina, Arab, India dan lain-lain. Orang-orang Cina tidak diizinkan tinggal di darat, mereka harus tinggal di air/laut Hal tersebut dikarenakan orang-orang Cina dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi stabilitas politik dan keamanan sultan. Oleh karena itu pada masa kesultanan Palembang orang-orang Cina tidak dapat menjadi petani. Adanya larangan tersebut mengakibatkan orang-orang Cina tinggal di atas rumah-rumah rakit, dan bekerja sebagai pedagang. Adapun jenis-jenis barang dagangannya antara lain: Kain Linen kasar dan halus yang umumnya sangat laku, juga berbagai barang pecah belah (keramik) dari Cina, sutra kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan dan lain-lain. (Van Sevenhoven, 1971: 47)

Pedagangan kain linen terbesar pada masa itu adalah orang-orang Arab karena mereka mempunyai kapal dan perahu sendiri, selain itu mereka menjadi kepala syahbandar yang mengurus barang dagangan orang-orang lain yang datang dari luar Palembang. Sesudah orang Arab menyusul orang Cina sebagai pedagang asing kedua yang bertindak sebagai agen-agen penyalur atau distributor. Selain menjadi pedagang ada juga orang-orang Cina di Palembang menjadi nelayan (penangkap ikan) disepanjang perairan sungai Musi,

ada juga yang menarik becak sehingga dikenal dengan panggilan becak Cina (Kemas Ari, tth: 38-39).

Orang Arab dan orang asing lainnya tinggal diantara penduduk. Orang-orang asing ini umumnya adalah pedagang, biasanya mereka tinggal dekat dengan pasar dan tinggal berkelompok. Kemungkinan pedagang-pedagang asing itu adalah orang muslim, terutama yang dibolehkan tinggal di darat bercampur dengan penduduk. Pedagang-pedagang muslim ini selain berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam dikalangan masyarakat (J.C. van Leur, 1955: 186). Tidak sedikit diantara orang-orang asing itu mempunyai peranan penting di dalam istana raja dan tidak kurang pula diantara mereka yang menjabat jabatan penting dalam kerajaan, seperti jabatan syahbandar yang pada umumnya terdiri dari orang-orang asing (Sartono Kartodirdjo, 1975: 186).

Sementara masyarakat Uluan pada umumnya kehidupan perekonomian mereka didasarkan pertanian tradisional (ladang), menangkap ikan dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti: damar, rotan, madu/lilin, margasatwa, gading dan lain-lain. Semuanya dibawa ke kota dengan melalui sungai karena lalu-lintas melalui darat hampir tidak ada. Jalan-jalan yang melalui darat baru mulai dibuat oleh pemerintah Belanda, setelah adanya perkebunan-perkebunan asing dan ditemukannya sumber-sumber minyak bumi di daerah ini pada akhir abad XIX atau awal XX. Garam dan bahan-bahan pakaian (tekstil) untuk daerah Uluan didatangkan dari pusat kerajaan secara barter.

Pada masa kolonial Belanda, untuk menjadikan garam sebagai komoditas ekspor ditempuh kebijakan monopoli garam oleh pemerintah dengan menerapkan ordonansi monopoli garam (*Zoutmonopolie Ordonnantie*). Di Indonesia, jauh sebelum kedatangan dan penguasaan oleh bangsa asing, garam telah menjadi komoditas (barang yang diperdagangkan). Pada masa prakolonial para penguasa pribumi di wilayah Nusantara yang menguasai pusat-pusat dan jalur perdagangan, termasuk di pantai utara Jawa pernah menjadikan garam sebagai komoditas ekspor ke beberapa negara dalam kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, kondisi tersebut berubah pada masa penjajahan oleh bangsa asing, karena kekuasaan atas produksi dan perdagangan garam kemudian jatuh ke tangan pemerintah kolonial dan pengusaha yang terdiri atas orang-orang Cina sebagai pachtter/penyewa. (Knaap Knaap, G.J. 1991. 127-157) Dengan demikian, garam sebagai komoditas ekspor tidak lagi dalam kontrol dan kekuasaan penguasa pribumi. Sehingga tidaklah heran pada masa kesultanan Palembang, sultan mendistribusikan garam untuk daerah Uluan Sumatera Selatan dengan melalui sistem barter dengan hasil bumi daerah Uluan.

Kebijakan pemerintah kolonial untuk tetap menjadikan garam sebagai komoditas ekspor adalah menciptakan institusi yang secara khusus menangani garam dan dilanjutkan dengan penataan manajemen serta regulasi kebijakan monopoli garam. Pemerintah kolonial di Indonesia baik Inggris maupun Belanda, cenderung memperkuat otoritasnya dalam penguasaan industri dan perdagangan garam,

karena komoditi ini dipandang dapat memberikan pemasukan keuangan yang besar kepada pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa garam sejak dahulu termasuk komoditas strategis yang menjadi perhatian dan kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Dalam perekonomian terdapat pula peran budak yang turut memberi warna tersendiri pada sejarah perekonomian Sumatera Selatan.

Eksistensi budak (hamba) adalah sebuah realitas historis. Budak merupakan salah satu warisan tertua peradaban masa lalu umat manusia. Selain sudah berlangsung dalam periode waktu yang sangat lama, keberadaan budak bersama institusi perbudakan merupakan sebuah fenomena umum yang hampir merata ditemukan pada berbagai komunitas, termasuk komunitas-komunitas yang berada di dunia Melayu.

Munculnya komunitas budak di dunia Melayu khususnya di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di masing-masing wilayah, tempat budak itu berada. Di beberapa bagian dunia Melayu terdapat institusi perbudakan. Tradisi dan adat istiadat pada sejumlah masyarakat lokal menyediakan ruang bagi terbentuknya institusi tersebut. Institusi perbudakan yang terdapat pada masyarakat yang bermukim di berbagai kawasan dunia Melayu, baik pada masyarakat pendukung kebudayaan Melayu itu sendiri maupun masyarakat pendukung kebudayaan lain, memperlihatkan beberapa kemiripan. Sebuah kemiripan yang dapat diamati ialah stratifikasi atau lapisan sosial yang ditempati golongan budak. Budak menempati strata tersendiri di dalam

struktur masyarakat yang bermukim pada beberapa kawasan di dunia Melayu termasuk di Sumatera. Di Sumatera menempatkan golongan budak menjadi sebuah strata tersendiri, terlepas dari strata-strata yang lain (Anatona, 2008: 149)

Di Sumatera Selatan, golongan budak terbagi menjadi: budak karena hutang dan budak belian. Budak disuruh mengerjakan sawah, memelihara perahu-perahu tambang/biduk-biduk. Budak merupakan golongan terendah yang dapat dibagi atas: budak karena hutang yang sifatnya sementara sampai hutangnya dapat dibayar dan budak belian yang sifatnya sangat mengikat dan biasanya mereka ini dieksplotir oleh tuannya, sehingga hilanglah kebebasan mereka. Orang bisa jatuh menjadi budak apabila melanggar adat atau kesalahan kepada raja. Tidak sedikit diantara mereka karena takut kehilangan kebebasannya melarikan diri ke dalam hutan yang untuk selanjutnya hidup terasing (Ma'moen Abdullah, 1991: 96). Ternyata perdagangan budak sudah umum di negeri kita zaman itu. Demikian juga di Palembang budak merupakan barang dagangan yang diekspor ke Malaka di samping beras, bawang merah, bawang putih, daging, arak, hasil hutan seperti: rotan, madu, damar, kapuk dan sedikit emas dan besi (M.A.P. Meilink Roelofsz, 1962:91).

Tenaga budak itu sangat diperlukan sebagai buruh-buruh kasar di pelabuhan dan sebagai pendayung-pendayung perahu bangsawan. Memang tepat apa yang dikatakan oleh van Sevenhoven, bahwa golongan budak adalah golongan yang paling celaka. Biasanya budak belian itu diperoleh dengan mengadakan ekspedisi khusus ke

daerah luar (Sartono Kartodirdjo, 1975:175), perahu-perahu atau junk-junk khusus mencari budak-budak berlayar ke sepanjang pantai daerah yang dituju. Oleh karena itu, budak mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat Sumatera Selatan

Simpulan

Palembang merupan ibukota Sumatera Selatan, dahulunya merupakan pusat perdagangan internasional pasca runtuhnya kerajaan Malaka oleh Portugis. Palembang memiliki sungai Musi, muara dari sungai Bangahari Sembilan. Sungai Musi yang penuh dengan perahu-perahu tambang dan rakit-rakit yang hilir mudik menjajahkan barang-barang dagangannya. Perdagangan itu tidak hanya dilakukan oleh penduduk kota saja, tetapi juga oleh orang-orang Uluan yang milir membawa hasil hutan dan tanamannya melalui anak-anak sungai Musi, ikut serta meramaikan pasar-pasar terapung itu.

Pada masa kesultanan, sultan mempunyai peran penting dalam perdagangan. Sultanlah yang turut menentukan harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang asing. Pedagang asing itu diantaranya berasal dari Arab, India, Cina dan lain-lain. Orang-orang Cina tidak diizinkan tinggal di darat, mereka harus tinggal di air/laut. Oleh karena itu pada masa kesultanan Palembang orang-orang Cina tidak dapat menjadi petani. Adanya larangan tersebut mengakibatkan orang-orang Cina tinggal di atas rumah-rumah rakit, dan bekerja sebagai pedagang. Pedagang-pedagang muslim selain berdagang juga sambil menyebarkan

agama Islam dikalangan masyarakat. Tidak sedikit diantara orang-orang asing itu mempunyai peranan penting di dalam istana raja dan tidak kurang pula diantara mereka yang menjabat jabatan penting dalam kerajaan, seperti jabatan syahbandar yang pada umumnya terdiri dari orang-orang asing.

Pada tanggal 18 Agustus 1823 dinyatakan bahwa Kesultanan Palembang dihapuskan dan kemudian pemerintah atas negeri Palembang dan rakyat Palembang diserahkan kepada Belanda. Sejak itu, Kesultanan Palembang telah berakhir. Berakhirnya Kesultanan Palembang secara politis, maka secara tidak langsung perekonomian Palembang dimonopoli oleh Belanda.

Kemudian di Sumatera Selatan terdapat juga golongan budak yang turut andil dalam perekonomian masyarakat. Budak diperkerjakan untuk menggarap sawah maupun sebagai pemelihara perahu-perahu tambang/biduk-biduk. Selain itu juga budak bahkan diperdagangkan bersama beras, bawang merah, bawang putih, daging, arak, hasil hutan seperti: rotan, madu, damar, kapuk dan sedikit emas dan besi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Idi. (2011). *Bangka: Sejarah Sosial Cina Melayu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anatona. (2008). Identitas Budak di Dunia Melayu. *Jurnal Humaniora*. 20 (2): 149-157.
- Alian Sair. (2012). *Criksetra*. Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah. Palembang : FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya,
- Husni Rahim. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi*

- tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Dudung Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Daliman. (2012). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- J.C. van Leur. (1995). *Indonesia Trade and Society*, The Hague Bandung: W. van Hoeve Ltd.
- Kemas Ari. (2002). *Masyarakat Tionghoa Palembang Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: FPS2B bekerjasama dengan PSMTI.
- Kenneth R. Hall .(1976). State and Statecraft in Early Srivijaya, dalam *Exploration in Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft*, Edited by: Kenneth R.Hall and John K. Whitmore,Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan.
- Knaap Knaap, G.J. (1991). "A Forgotten Trade: Salt in Southeast Asia 1670-1813". Dalam Gerrit J. Knaap, Luc Nagtegaal & Roderich Ptak (eds), *Emporia, Commodities And Entrepreneurs In Asian Maritime Trade*, C. 1400-175. Wiesbaden, Steiner.
- Ma'moen Abdullah. (1991). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Sumatera Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marwati Djoened. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta, Balai Pustaka.
- M.A.P. Meilink Roelofsz. 1962). *Asian Trade and Europeans Influens in the Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague martinus Nijhoff.
- Nina Herlina. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Prajudi Atmosudirdja. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi sampai akhir Abad ke XIX*, Jakarta, Pradnya Paramita, Tth.
- P.De Roo De La Faille. (1971). *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Van Sevenhoven. (1971). *Lukisan Kota Palembang*, Jakarta, bhratara.
- Sartono Kartodirdjo et al. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Slamet Muljana. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Yogyakarta, LkiS.
- Sumadi Suryabrata. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Taufik Abdullah. (1986). *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan*, dalam KHO Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta, UI Press.